

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Kemampuan dalam pekerjaan dan perbandingan jumlah perempuan dengan laki-laki tidak jauh berbeda dalam lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pimpinan perempuan yang dapat menduduki dan diposisikan sebagai pimpinan dalam jabatan struktural akademik dan non-akademik. Dalam lingkungan civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia pimpinan masih didominasi oleh laki-laki, walaupun secara kemampuan akademik perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan.

Perjuangan kaum perempuan sebagai bentuk gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak yang sama yang seharusnya diperoleh kaum perempuan. Timbulnya gerakan ini adalah kesadaran memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan. Konstruksi cara pandang masyarakat patriarki menjadi hambatan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Sudut pandang masyarakat patriarki menghendaki laki-laki menjadi prioritas utama dalam kehidupan dan memiliki posisi yang dianggap lebih penting daripada perempuan.

Konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan keilmuan. Keadaan seperti ini memberikan batasan yang sangat kentara atas hal-hal yang dilakukan oleh perempuan serta hak-hak yang didapatkan perempuan dalam kehidupan di masyarakat.

Bertambah banyaknya perempuan yang berpendidikan semakin membuat gerakan perempuan berkembang, pemikir-pemikir perempuan mulai memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan, terlepas dari pengaruh dunia luar khususnya dunia barat yang memunculkan paham feminisme sebagai bentuk perjuangan memperjuangkan keadilan bagi perempuan, pemikiran-pemikiran tersebut membuka pandangan perempuan Indonesia dan memberikan pengaruh terhadap kaum perempuan secara luas melalui pemikiran dari ilmuwan perempuan dan ilmuwan yang mendukung paham feminisme untuk memperjuangkan haknya.

Perlakuan masyarakat terhadap perempuan seringkali memberikan titik terang yang sama bagi pemikir-pemikir yang mendukung adanya perjuangan perempuan yaitu perempuan perlu mempunyai hak yang sama tentang apa yang menurut perempuan itu baik, walaupun pengalaman dan pandangan perempuan tentang masalah yang dihadapi berbeda-beda. Artinya, perempuan menghendaki bahwa apa yang dianggap baik adalah bukan monopoli kaum laki-laki atas perempuan sebagai gerakan perjuangan kaum perempuan.

Pemikiran-pemikiran tentang perempuan mengharapkan adanya perubahan yang menguntungkan kaum perempuan, dalam budaya masyarakat sampai saat ini laki-laki masih diposisikan sebagai kaum yang berada dalam posisi yang utama. Budaya sebagai sebuah gagasan, tindakan dan karya yang telah turun menurun diwariskan sampai sekarang sepertinya tetap ajeg memposisikan laki-laki sebagai prioritas utama dan belum dapat memposisikan perempuan kepada posisi yang lebih baik, bukan dalam artian memberikan kesempatan perempuan dalam posisi pertama dan laki-laki adalah kaum kedua. Tetapi, memberikan posisi yang lebih baik bagi perempuan di mana perempuan diposisikan memiliki hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat, gerakan feminis pun membawa perjuangan-perjuangan perempuan untuk menyuarakan pendapatnya,

Berawal dari prinsip-prinsip maskulin dan feminim, laki-laki dan perempuan men-diferensiasikan dirinya ke dalam maskulinitas dan feminitas individu. Hal tersebut membuat laki-laki dan perempuan berlomba-lomba menunjukkan dirinya, yaitu laki-laki sebagai kaum yang maskulin dengan superioritasnya dan perempuan sebagai kaum yang feminim dengan perjuangannya menghentikan superioritas dari laki-laki. Sampai saat ini walaupun perempuan memperjuangkan prinsip feminisme pada setiap aspek kehidupan dominasi-maskulinitas laki-laki dan budaya patriarki dalam masyarakat masih menghendaki laki-laki berada dalam posisi yang lebih tinggi.

Gerakan feminisme abad ke-19 berkembang pesat sebagai reaksi terhadap kesulitan-kesulitan khusus yang dihadapi masing-masing perempuan dalam hidupnya: yang disebabkan oleh munculnya ‘tokoh kunci’, dan sejumlah kampanye untuk meraih hasil akhir yang jelas. Pada akhir abad itu, pembenahan-

pembenahan pokok telah selesai, tetapi istilah ‘feminis’ dan ‘feminisme’ baru saja digunakan (Sanders dalam Gamble 2004, 19). Tokoh kunci yang dikenal dengan gerakan feminisme modern ini adalah Mary Wollstonecraft, melalui karyanya *Vindication Rights of Woman* (1792) perannya sebagai ikon gerakan perempuan mulai dikenal melalui gagasannya.

Disadari maupun tidak oleh masyarakat, perempuan selalu diidentikkan dengan sosok individu yang lemah lembut, memiliki sifat yang emosional dan keibuan menjadikan perempuan selalu diposisikan dalam posisi yang kurang strategis, tidak seperti laki-laki yang memiliki kesempatan yang lebih besar karena laki-laki identik dengan sosok yang kuat hingga kasar dan memiliki sifat yang rasional.

Potensi besar perempuan untuk memajukan bangsa disadari oleh Kartini sebagai gagasan atas pergaulannya dengan bangsa Belanda, perjuangannya untuk memberikan akses pendidikan kepada kaum perempuan membuka gerakan perempuan melalui organisasi perempuan Indonesia pertama atas prakarsa organisasi Boedi Oetomo pada 1912 yang dinamakan Poetri Mardika. Organisasi tersebut didirikan dengan keyakinan bahwa perempuan harus digerakkan supaya pemikiran-pemikiran tentang kemajuan bangsa lebih mudah disebarluaskan. Suryochondro (dalam Omas, 1995, hlm. 42) berpendapat bahwa “Organisasi wanita adalah wadah di mana wanita belajar memperluas wawasannya, tampil di muka umum, memikirkan masalah-masalah masyarakat di luar lingkungan domestik”.

Setelah tercetusnya sumpah pemuda pada tahun 1928 pergerakan perempuan membuat federasi yang dinamakan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada tahun 1935 yakni menuntut dan mempertahankan keadilan sosial agar keselamatan perikemanusiaan dalam masyarakat Indonesia terjamin (Kartowijono, 1975, hlm. 11) yang merupakan visi kaum perempuan untuk memperjuangkan keadilan sampai saat ini melalui organisasi.

Cara pandang terhadap maskulinitas pria untuk memberikan perlawanan terhadap dominasi laki-laki kepada perempuan adalah upaya yang dilakukan pengerak feminisme. Senada dengan yang diungkapkan Tong (1993, hlm. 392) menegaskan “Prinsip ‘feminitas’ bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih dan

kebersamaan. Sebaliknya, maskulinitas bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan, yaitu prinsip penghancuran”.

Upaya yang dilakukan oleh penggerak kewanitaan memperjuangkan kesetaraan gender dalam pandangan feminisme bukanlah hal yang diabaikan oleh Indonesia. Komitmen secara politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum perempuan tercermin dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak dan kesempatan, meskipun baru pada Pelita III (1978-1983) dimasukkan peranan perempuan di dalam pembangunan bangsa.

Pada tahun 1978 dibentuk Menteri Urusan Peranan Wanita yang memberikan asumsi bahwa isu tentang perjuangan kaum perempuan tetap diperhatikan. Perdebatan hak yang sama atas warga negara yang diatur pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa tidak ada pengecualian terhadap hukum atas pelaksanaan serta penerapan hukum di Indonesia. Sementara pada pasal 28 D ayat 3 juga ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sementara itu hal tersebut diperkuat dengan Lampiran VII Butir- Butir Kesepakatan Internasional Terkait dengan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Butir I Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yakni:

Membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat, khususnya menjamin perempuan atas dasar persamaan hak dengan laki-laki dalam hal: a) memilih dan dipilih; b) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam

pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkat; dan c) berpartisipasi dalam organisasi masyarakat.

Selanjutnya butir V Kesepakatan Tentang Target Millenium (Mdgs) Tahun 2000 terdapat 8 butir kesepakatan tentang target yang harus dicapai pada tahun 2015 salah satunya yaitu “Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”.

Dalam pasal yang telah diatur tersebut pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap warga negara untuk menjadi seorang pemimpin karena telah disebutkan bahwa adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang menjadi hak setiap warga negara dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang ada serta turut mendukung dan melaksanakannya.

Penggiat perempuan pun bukan berkembang tanpa adanya hambatan, banyak pula pihak yang menentang adanya perjuangan kaum perempuan untuk menghilangkan ketidakadilan (bias) gender. Menurut Engineer (2000, hlm. 63) dalam karyanya mengemukakan bahwa “Dimitoskan bahwa akan ada malapetaka yang sangat besar apabila perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri”. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas perempuan dalam memimpin serta didukung dengan konstruksi sosial yang telah dibentuk bahwa perempuan tidak diciptakan sebagai *leader* adalah tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan.

Kepemimpinan perempuan merupakan problematika kaum perempuan yang harus diatasi oleh perempuan itu sendiri. Ketika dihadapkan pada kondisi memilih pemimpin di antara laki-laki dan perempuan masih banyak pemikiran masyarakat yang menganggap laki-laki masih lebih layak untuk menempati posisi kepemimpinan, kata-kata yang lazim di ungkapkan dalam kondisi tersebut adalah “dalam agama idealnya pemimpin itu ya laki-laki” sesuai dengan yang diungkapkan Kinanti (26). Kecenderungan masyarakat untuk memilih laki-laki melebihi perempuan menjadikan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh perempuan dibatasi sebagai bentuk monopoli laki-laki dalam sektor publik.

Kebijakan yang telah diatur sebenarnya bukan tanpa polemik, hal yang mendasari polemik berkembang adalah kontribusi perempuan yang dibatasi dengan adanya pembatas dalam nominal tertentu, pemikir-pemikir perempuan dan orang-orang yang mendukung pergerakan perempuan sebagai suatu perjuangan

berasumsi bahwa angka tiga puluh persen tersebut bersifat merendahkan wanita, memberikan kuota hanyalah kebijakan yang ditujukan sebagai kompensasi atas perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Pandangan tersebut muncul sebagai ketidakpuasan perempuan dengan adanya pembatasan yang tidak berlaku bagi laki-laki, memberikan kebebasan kepada laki-laki dengan memberikan batasan terhadap perempuan bukanlah suatu solusi, yang diinginkan adalah perempuan juga diberikan hak-hak yang sama dengan laki-laki.

Dilema yang dihadapi pada perempuan ketika diberikan kesempatan dalam posisi kepemimpinan bukan tentang kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin tetapi lebih kepada posisi perempuan yang seringkali lebih memilih dalam zona aman, yakni lebih memilih mengurus urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab seorang perempuan. Selain itu, dalam sudut pandang perempuan jika membandingkan untuk memilih laki-laki atau perempuan sebagai pemimpin, perempuan pada umumnya tidak mendukung perempuan dijadikan sebagai pemimpin. Artinya, dukungan dari sesama perempuan pun belum tentu didapatkan bagi perempuan yang mencoba untuk keluar dari zona domestiknya.

Meskipun masih dihadapkan pada dilema keinginan untuk keluar dari zona domestik perempuan dengan tidak sejalannya dukungan antara perempuan untuk saling mendukung sesamanya dalam memperjuangkan kepemimpinan perempuan, perempuan masih berkeyakinan untuk memberikan inovasi dalam segala aspek kehidupan. Media massa internasional pun mulai memberitakan kemunculan era baru kepemimpinan. *Business Week* menerbitkan artikel bahwa perempuan mempunyai “*Right Stuff*” dalam kepemimpinan, *Fast Company* menyetujui bahwa “*The future of business depends on women*”, (Eagly, 2003, hlm. 808).

Kecenderungan khalayak ramai semakin memberikan gambaran positif terhadap kepemimpinan perempuan. Dalam pandangannya Sjahrir (dalam Tan, 1996, hlm. 20) mengungkapkan bahwa “Peranan perempuan akan semakin menonjol dan dibutuhkan baik sebagai sumber daya manusia yang penting, pemikir maupun sebagai pengambil keputusan”. Pendapat tersebut menjabarkan adanya keyakinan atas kemampuan perempuan untuk meretas pembatasan yang dilakukan atas monopoli laki-laki karena sebenarnya perempuan memiliki kelebihan yang tidak banyak dimiliki oleh laki-laki, sifat perempuan cenderung rapi dan terstruktur

dalam mengerjakan segala hal, selain itu perempuan lebih cekatan serta teliti dalam mengerjakan sesuatu memberikan nilai positif bagi keberadaan perempuan untuk dapat dipilih sebagai pemimpin. Hal-hal tersebut merupakan bekal bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki walaupun keberadaan laki-laki memang sulit untuk digantikan.

Munculnya banyak perempuan yang bisa menjadi *role model* tentu banyak mengilhami banyak perempuan lain untuk juga bisa mengembangkan sayap kesempatan mereka. Kalau sedari kecil seorang anak melihat perempuan pengusaha, pemimpin sosial dan politik, ilmuwan dan peneliti, tentu tidak mengherankan jika mereka tumbuh dengan keinginan untuk kelak juga bisa mencapai prestasi serupa atau malah lebih (Daud dalam Tan, 1996, hlm. 18). Pemberian pemahaman masyarakat yang keliru tentang perempuan yang selalu berperan dalam sektor domestik mengakar pada setiap generasi termasuk kepada diri perempuan, keengganan untuk memilih perempuan bukan hanya disampaikan oleh laki-laki, bahkan perempuan pun enggan untuk memilih perempuan sebagai pemimpin, hal ini tentu berkaitan tentang konstruksi masyarakat yang kurang membuka pandangan terhadap perempuan untuk berperan lebih dalam kehidupan.

Gerakan-gerakan penggiat perempuan semakin menjelma di perguruan tinggi. Sampai saat ini banyak sekali pusat studi tentang perempuan, serta gerakan feminisme berkembang sebagai sebuah usaha perempuan untuk mendapatkan hak yang lebih baik. Kajian tentang gerakan sosial yang dilakukan oleh perempuan, penelitian-penelitian sosial tentang perempuan, mencoba memahami dan mengembangkan teori-teori mengenai kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat merupakan misi yang selalu diemban dalam tiap-tiap kegiatan penggiat perempuan. Gerakan tersebut memberikan semangat dalam pembentukan lembaga bantuan hukum untuk perempuan sebagai salah satu usaha untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia.

Perempuan pun mulai sadar dengan adanya lembaga pendidikan, akan memberikan perempuan ruang yang lebih luas untuk mengaktualisasikan dirinya, selain itu dengan terbukanya akses pendidikan bagi perempuan, sifat perempuan yang teliti, rapi dan terstruktur disadari oleh civitas akademika untuk dimasukkan ke dalam sebuah sistem supaya pendidikan, keilmuan, dan bidang penelitian

menjadi semakin berkembang. Dengan kehadiran perempuan sebagai ilmuwan tentu akan menjadi *role model* bagi perempuan lainnya dalam mengembangkan potensinya.

Banyaknya perempuan yang telah menempuh gelar sarjana, magister hingga doktoral menjadi titik terang bahwa perempuan pun dapat bersaing secara langsung dengan laki-laki bahkan secara fungsional perempuan selalu dihadapkan pada persaingan langsung dengan laki-laki, kompetisi tersebut juga terjadi dalam lingkungan civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia di mana perempuan dihadapkan pada persaingan dalam keilmuan bidang akademik untuk dapat dijadikan sebagai guru besar, yang secara fungsional adalah derajat yang paling tinggi dalam sistem fungsi pendidikan di perguruan tinggi.

Terakhir kali Universitas Pendidikan Indonesia pada 4-5 Oktober 2016, mengukuhkan tujuh guru besar dipimpin langsung oleh Rektor UPI, Prof. Dr. Furqon, M.A., Ph.D., Guru besar yang dikukuhkan ialah Prof. Dr. Johar Permana, M.A., Prof. Dr. Ratih Hurriyati, M.P., Prof. Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum., Prof. Emi Emilia, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed., Prof. Dr. Hj. Kokom Komalasari, M.Pd., Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si., diantara ketujuh nama guru besar yang dikukuhkan tersebut, empat orang guru besar yang dikukuhkan adalah perempuan. Hal tersebut merupakan perkembangan yang progresif di mana perempuan mampu melampaui laki-laki dalam persaingannya karena pada tahun 2012 enam guru besar yang dikukuhkan tidak sebanyak tahun 2016. Pada 25-26 April 2012 Universitas Pendidikan Indonesia mengukuhkan dua perempuan dari enam guru besar yakni Prof. Dr. Fransisca Sudargo, M.Pd., Prof. Ace Suryadi, Ph. D., Prof. Hj. Hertien Koosbandiah Surkanti, M.Sc.; E.S., Ph. D., Prof. Dr. H. Nanang Priatna, M.Pd., Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed., Prof. Dr. H. Darhim, M.Si.

Berdasarkan temuan data dari Surat Keputusan Rektor UPI Nomor 4925/UN40/KP/2015 pada 23 Juli 2015 telah disahkan yakni, ada 118 orang yang dilantik sebagai Ketua Program Pendidikan (Departemen) dan Sekretaris Program Pendidikan. Diantaranya ada 38 perempuan dipercayai untuk menduduki jabatan sebagai tugas tambahan untuk memimpin, terdiri dari 24 orang sebagai ketua program pendidikan/departemen dan 14 orang sebagai sekertris program pendidikan, Ketertarikan peneliti terhadap permasalahan ini didasari adanya

fenomena kepemimpinan perempuan dalam lingkup Universitas Pendidikan Indonesia dijadikan sebagai pemimpin yang bersifat struktural akademik.

Selain itu data lain dalam observasi awal yang dilakukan penulis mencatat bahwa. Tertanggal 22 Desember 2015, 37 Perempuan dari total 124 orang sebagai kepala UPT, kepala kantor, kepala bagian, kepala divisi, kepala sub bagian dan kepala seksi yang diangkat pada tanggal yang sama sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 8144/UN40/KP2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural ini dilihat memiliki taraf signifikansi yang cukup besar bila dilihat pada tahun 2009 hanya terdapat 21 perempuan dari 94 orang kepala UPT, kepala kantor, kepala bagian, kepala divisi, kepala sub bagian dan kepala seksi yang diangkat.

Dengan adanya kedudukan perempuan dalam posisi kelembagaan ini menunjukkan bahwa perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Walaupun secara perbandingan jumlah laki-laki masih mendominasi. Budaya patriarki masih melekat dalam masyarakat sebagai realitas sosial, pengakuan bahwa perempuan bisa dijadikan pemimpin menjadi pertanyaan sebagai momentum isu gender dalam kehidupan. Artinya, posisi perempuan yang sebenarnya dalam ketidakadilan dan termarginalisasi oleh sistem nilai perlahan mulai diakui sebagai individu dalam masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Atas asumsi tersebut peneliti beranggapan harus adanya kesetaraan gender dalam segala bagian dari struktur masyarakat, dalam pembahasan ini masyarakat yang dimaksud adalah Universitas Pendidikan Indonesia mengenai kesetaraan gender sebagai kesempatan yang sama setiap individu dalam kepemimpinan.

Penelitian fenomena kesempatan perempuan dalam kepemimpinan ini ditinjau dari peran perempuan dalam kegiatan struktural kepemimpinan, aksesibilitas perempuan dalam menempati posisi kepemimpinan, kendala yang dihadapi perempuan dalam menempati jabatan kepemimpinan dan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan serta pembentukan nilai dan

pandangan baru dalam masyarakat terhadap perempuan yang diposisikan sebagai pemimpin.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang kepemimpinan perempuan, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahra, (2014, hlm. 16) tentang Peran Publik Perempuan dalam Parlemen, Studi Analisis Representasi Wakil Rakyat Perempuan dalam Lintas Sejarah Indonesia, yang menyatakan bahwa “Gerakan perempuan belum maksimal memanfaatkan parlemen sebagai lapangan perjuangannya yang berkualitas”. Serupa dengan temuan tersebut, hal yang dijabarkan dalam penelitian yang dikemukakan oleh Malaiha, (2014, hlm. 29) mengenai Peran Perempuan dalam Formulasi Kebijakan, bahwa:

Ada kendala internal dan eksternal yang dihadapi *stakeholders* perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di anggaran. Kendala internal antara lain kurangnya pemahaman *stakeholders* perempuan akan kebutuhan perempuan, posisi politisi perempuan yang kurang strategis dalam tim perumus anggaran, dan konflik peran yang dialami *stakeholders* perempuan. Sedangkan kendala eksternal meliputi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada wilayah publik dan perempuan pada wilayah domestik dan pemahaman agama yang terlalu tekstual. Untuk mencapai derajat keterlibatan yang tinggi maka *stakeholders* perempuan harus meningkatkan SDM-nya dengan mengikuti pendidikan politik, *legal drafting*, dan pelatihan-pelatihan gender serta membangun jejaring.

Dua penelitian tersebut menunjukkan kurang maksimalnya gerakan perempuan dalam kepemimpinan. Temuan lain disampaikan melalui penelitian Fariyah, (2015, hlm. 17) tentang Etos Kerja dan Kuasa Perempuan dalam Keluarga: Studi Kasus Keluarga Nelayan, di Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Yang menyatakan bahwa:

Tingkat akses dan kontrol perempuan sudah mengalami kemajuan, meskipun pada beberapa tindakan laki-laki yang superior dan bersifat patriarkhis masih terjadi. Namun di antara mereka sudah tampak adanya ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dan saling mengisi peranan antara suami dengan istri tetap terjadi pada para responden.

Dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan tentang peran dan kepemimpinan perempuan ditinjau dari penelitian terdahulu. Peneliti tertarik untuk meneliti kepemimpinan perempuan dalam lingkungan civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, ditinjau dari heterogenitas pendidikan yang

berbeda sebagai pertimbangan lain untuk mendapatkan jabatan struktural akademik dan non-akademik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran persoalan mengenai kepemimpinan perempuan dalam lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Fenomena Kepemimpinan Perempuan di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penelitian mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu “Bagaimana Fenomena Kepemimpinan Perempuan di Universitas Pendidikan Indonesia”. Untuk memberikan arah dalam penyusunan penelitian ini maka dari itu rumusan masalah tersebut dibuat dalam beberapa pertanyaan yang telah dibuat penyusun, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia tentang peran dan tugas perempuan dalam jabatan secara struktural akademik dan non-akademik?
2. Bagaimana motivasi perempuan dalam menduduki jabatan struktural di Universitas Pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana kesetaraan kesempatan perempuan dalam menduduki jabatan struktural di Universitas Pendidikan Indonesia?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi perempuan yang memiliki jabatan struktural di Universitas Pendidikan Indonesia?
5. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap kepemimpinan yang dipegang oleh perempuan?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan ini adalah mendapatkan gambaran mengenai fenomena kepemimpinan perempuan di Universitas Pendidikan Indonesia. Didasarkan kepada peran perempuan dalam kepemimpinannya serta bagaimana pandangan umum masyarakat mengenai

adanya perempuan yang memimpin dan memiliki jabatan secara struktural akademik dan non-akademik.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan mengkaji konstruksi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia tentang peran dan tugas perempuan dalam jabatan secara struktural akademik dan non-akademik.
2. Mendeskripsikan motivasi perempuan dalam menduduki jabatan struktural di Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Mendeskripsikan dan mengkaji kesetaraan kesempatan perempuan dalam menduduki jabatan struktural di Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi perempuan yang memiliki jabatan struktural di Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Mendeskripsikan dampak yang terjadi terhadap jabatan struktural akademik dan non akademik yang dipegang oleh perempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal berikut:

1. Memperoleh ilmu dalam bidang Sosiologi yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Dapat digunakan sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para peserta didik pada umumnya, pelaku pendidikan dan mahasiswa jurusan pendidikan sosiologi.
3. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya, di bidang pendidikan sosiologi tentang Fenomena Kepemimpinan perempuan di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berikut ini:

1. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi referensi universitas dalam mengkaji peran serta perempuan dalam upaya pengembangan universitas melalui peran-peran kepemimpinan yang dijalankan baik oleh pria ataupun perempuan.
2. Bagi Kemenristekdikti, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi dan informasi atas peran serta perempuan dalam sebuah lembaga universitas.
3. Bagi kalangan profesi seperti pendidik Sosiologi, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam upaya memahami fenomena kesetaraan gender.
4. Bagi perempuan dalam jabatan kepemimpinan, penelitian ini senantiasa dapat dijadikan acuan untuk perempuan dalam menempuh jenjang karir yang lebih baik, didasarkan pada profesionalisme.
5. Bagi laki-laki dalam jabatan kepemimpinan, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan kinerja perempuan dalam dunia kerja serta persaingan kedudukan.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini kepada berbagai pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini peneliti sajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang akan peneliti laksanakan pada penelitian sebagai dasar utama penelitian.

- BAB II : Tinjauan pustaka, pada bab ini peneliti akan menguraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan focus penelitian, kerangka pemikiran peneliti, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan peneliti.
- BAB III : Metode penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian fenomena kepemimpinan perempuan di Universitas Pendidikan Indonesia.
- BAB IV : Temuan dan pembahasan, pada bab ini peneliti melalui data yang telah terkumpul dalam penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya dianalisis, analisis mencakup peran dan tugas perempuan dalam kepemimpinan, kesetaraan kesempatan perempuan dalam kepemimpinan dan kendala yang dihadapi perempuan dalam menduduki jabatan kepemimpinan.
- BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi, dalam bab ini peneliti melalui hasil analisis data yang telah dilakukan dalam temuan peneliti, mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian skripsi.